

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Agus Darmawan

NPM: 1321010038

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H / 2017 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Serjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Agus Darmawan

NPM : 1321010038

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing II : Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Oleh
Agus Darmawan

Manusia hakikatnya membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada kemaksiatan, maka harus diikat dengan perkawinan yang sah. Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk kedalamnya manusia. Sesuai dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, meskipun ada perbedaan yang *urgen*. Seperti dalam pernikahan beda agama, hal itu akan tidak sampai pada tujuan perkawinan. Pada Tahun 2014, beberapa mahasiswa dan konsultan hukum mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) agar ada penambahan frasa untuk melegalkan pernikahan beda agama. Dalam pandangan Para Pemohon, Pasal *a quo* itu bertentangan dengan UUD N RI 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya tanggal 15 Desember 2014, menolak untuk keseluruhannya permohonan uji materi yang diajukan. Dan amar putusan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 Juni 2015.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama.? dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama.? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 dan untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang pernikahan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yakni berupa bahan hukum primer berupa Putusan MK No.68/PUU-XII/2014, Al-Qur'an, Hadits, UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA. Bahan hukum sekunder berupa Tafsir Al-Qur'an, fatwa MUI, kitab fiqh, buku mengenai hukum perkawinan, fatwa organisasi keagamaan, pendapat pakar hukum jurnal konstitusi dan jurnal hukum,. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, buku metode penelitian, maktaba syamila, koran, majalah, karya tulis dan artikel baik cetak ataupun online. Pengolahan data melalui *editing*, *coding* dan rekonstruksi data. Lalu data dianalisis secara deskriptif-analitis dan kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. Bunyi Pasal 2 ayat (1) adalah hasil perdebatan panjang di DPR pada 1973, dan para Pemohon dalam petitum berupa penambahan frasa harusnya melihat itu jangan hanya melihat secara cara penafsiran yang berbeda-beda dan melihat maraknya penyelundupan hukum saat ini. Pertimbangan hakim dianalisis dari landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan harus mencakup cita hukum (*idee des recht*) yaitu unsur keadilan (*garechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku (*law in the book*), namun Mahkamah Konstitusi selalu memperhatikan dari kemanfaatan (*law in action*) dengan paradigma hukum progresif yang tidak

lepas dari Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, menggunakan tiga teori. Grand teori atau teori primer berupa *maslahah mursalah*, teori sekunder berupa *sa'du dzariyat* dan teori tersier berupa paradigma relasi Agama dan Negara. Setelah dikaji dari ketiga teori tersebut, penambahan frasa dalam Pasal 2 ayat (1), lebih banyak menimbulkan *mafsadat* dan tidak sesuai sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 yang menolak permohonan Para Pemohon sudah sesuai dengan hukum Islam.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Agus Darmawan

NPM : 1321010038

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK
NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG
PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama**, disusun oleh Agus Darmawan, NPM. 1321010038, Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah, telah diujikan dalam siding munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada hari jum'at, tanggal 7 April 2017.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Marwin, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Ahmad Sukandi, M.H.I.	(.....)
Penguji I	: Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Khairuddin, M.H.	(.....)



DEKAN,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ , حَتَّى يَصِيرَ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .
(ابونعيم والديلمي)

Artinya : “Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (H.R. Abu Na’im dan Adailami)”¹

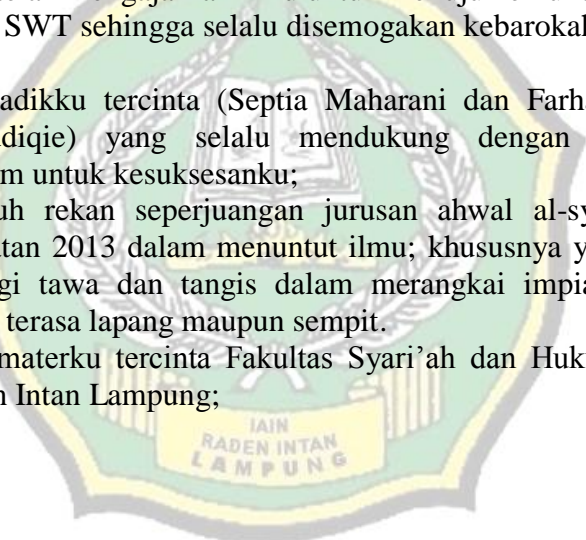


¹ Jalaluddin As-Suyuti, *Jami' Al-Hadits* (t.t : Maktaba Syamila, t.t), Bab Huruf Lam, Juz 17, Nomor 354.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. *Murobbil Jismi* yaitu Bapak dan Ibu (Sobri, S.Ag, M.H.I. dan Masriyah, S.Ag.) tercinta yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidiku dan selalu memberi kasih sayang serta meneguhkan keyakinanku dikala aku tersesat dan putus asa, yang mencontohkan arti kerja keras dan tanggung jawab dalam perjalananku sampai saat ini;
2. *Murobbir Ruhi* yaitu para Kyai, Dosen, Guru, dan Ustadz yang telah mengajarkan ilmu untuk menuju kemuliaan di sisi Allah SWT sehingga selalu disemogakan kebarokahan hidup ini;
3. Adik-adikku tercinta (Septia Maharani dan Farhan Rizky Ashiddiqie) yang selalu mendukung dengan menebar senyum untuk kesuksesanku;
4. Seluruh rekan seperjuangan jurusan ahwal al-syakhsiyah angkatan 2013 dalam menuntut ilmu; khususnya yang telah berbagi tawa dan tangis dalam merangkai impian dikala hidup terasa lapang maupun sempit.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung;



RIWAYAT HIDUP

Agus Darmawan adalah nama penulis, dibesarkan di Kampung Lingsuh, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Lahir pada 14 Februari 1995, Putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Sobri, S.Ag, M.H.I. dan Masriyah, S.Ag.

Riwayat pendidikan penulis yaitu:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Ismaria Al Qur'aniyyah Rajabasa, Bandar Lampung. Lulus pada Tahun 2001.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Rajabasa Raya, Rajabasa, Bandar Lampung. Lulus pada Tahun 2007.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tanjungkarang, Pahoman, Bandar Lampung. Lulus pada Tahun 2010.
4. Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1, Sukarame, Bandar Lampung. Lulus pada Tahun 2013.
5. Melanjutkan Perguruan Tinggi di IAIN Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada Tahun 2013.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA”, dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I, Bapak Dr. Drs. KH. M. Wagianto, S.H., M.H, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;
5. Seluruh dosen, asisten dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing selama mengikuti perkuliahan.

6. Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan hubungannya dengan akademik;
7. Guru-guru yang telah mendidiku dari sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas;
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Angkatan 2013, serta adik-adik AS khususnya.
9. Kawan-kawan KKN 32, yang kehadirannya telah mengajarkanku arti keluarga.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 10 April 2017

Penulis,

Agus Darmawan

NPM. 1321010038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II : PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Dasar Hukum Melakukan Perkawinan dalam Hukum Islam	24
a. Dasar Hukum Perkawinan dalam Al- Qur'an.....	24
b. Dasar Hukum Perkawinan dalam Hadits.....	28
3. Anjuran untuk Menikah dan Memilih Pasangan	30
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan dalam Hukum	32
5. Tujuan Pernikahan	35
6. Pendapat Ulama mengenai Pernikahan Beda Agama	42
B. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Positif	58
1. Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia .	59
2. Gambaran Pernikahan Beda Agama di Indonesia	66

a. Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama	66
b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986	70
3. Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan Beda Agama.....	71

BAB III : PUTUSAN PERKARA MK NO.68/PUU- XII/2014 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pihak-Pihak yang Mengajukan Permohonan <i>Judicial Review</i>	75
B. Latar Belakang Pengajuan Permohonan <i>Judicial Review</i>	76
C. Alasan Hukum Pengajuan Permohonan <i>Judicial Review</i>	80
D. Isi Tuntutan Permohonan <i>Judicial Review</i>	82
E. Putusan Perkara MK No.68/PUU-XII/2014	83
F. Rekapitulasi Putusan MK dalam bidang Perkawinan	84

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama	87
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama	99

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari kesalahan pemahaman dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atau bagian-bagian, atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.² Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.³

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman dan tempat manusia.⁴

² Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999), h. 61.

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.1713.

⁴ Said Aqil Husni Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h.6

Hukum Islam menurut T.M.Hasbi Ashshiddiqi adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (*fuqoha*) untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.⁵

Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan Negara.⁶ Mahkamah Konstitusi adalah lembaga (tinggi) negara baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA) yang berkedudukan di ibukota Indonesia dengan 9 orang hakim yang telah dilantik setelah mengucapkan sumpah jabatan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping MA dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara.⁷

Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 adalah putusan mengenai penolakan penambahan frasa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, putusan ini mengenai pernikahan beda agama yang dirasa pemohon judicial review bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD N RI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai'.⁸

Penjelasan istilah judul di atas mengartikan mengenai apa yang dimaksud dari judul skripsi ini, adalah bagaimana

⁵ Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.44.

⁶ Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No 1 Maret 2007, h.2.

⁷ Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*, (Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2014), h.18

⁸ Putusan MK No.68/PUU-XII/2014

hukum Islam memandang pernikahan beda agama yang telah marak dilakukan di Indonesia melalui penyelundupan hukum dan telah diajukan permohonan pengujian *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan frasa 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai'. Penambahan frasa ini dirasa pemohon lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, dan tidak mengabaikan HAM seperti Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang berlaku. Kemudian pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi ini adalah :

1. Alasan Obyektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama menggunakan hukum Islam dan positif.

2. Alasan Subyektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia hakikatnya membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada

kemaksiatan. Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk kedalamnya manusia. Sesuai dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*⁹

Manusia yang dibahas penulis disini, lebih ke masyarakat indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dalam kultur masyarakat indonesia mencari pasangan ditempuh dengan jalur pernikahan. Karena keberagaman suku, ras dan agama yang ada di Indonesia, pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan beda agama banyak terjadi di Indonesia.

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama. Hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰ Dengan ketentuan Pasal diatas, bisa diartikan pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan .

Oleh karena ketentuan dalam Pasal tersebut, tidak jarang saat seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang berlainan agama. Pasangan tersebut akan berpindah agama atau melakukan penyelundupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Sebagaimana diungkapkan Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Wahyono Darmabrata, dalam artikel “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda

⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.756

¹⁰ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Agama”, ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu :

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. Menikah diluar negeri.¹¹

Seseorang bisa pindah agama mengikuti calon pendamping nya atau sebaliknya, agar pernikahan pasangan tersebut dinyatakan sah. Dapat pula berakhirnya hubungan pasangan tersebut, kemungkinan lain bahkan terjadi pernikahan beda agama namun akhirnya hanya tercatat di catatan sipil. Baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun publik figur dilayar kaca televisi, menjadi bukti akan praktek pernikahan beda agama. Artis Jamal Mirdad dan Lidyia Kandung yang telah melakukan pernikahan beda agama bertahun-tahun dan sudah dikaruniai anak pun, mengikuti ibu nya untuk memeluk agama kristen. Hal ini menjadi bukti bahwa peran ayah sebagai kepala rumah tangga, tidak menjamin si anak mengikuti agama yang dipeluknya. Teranyar artis yang dihebohkan pernikahan beda agama dengan penundukan sementara pada salah satu hukum agama adalah Asmirandah dan Jonas Rivano hingga berakibat Pembatalan Nikah antara keduanya.

Sejalan dengan perkembangan hukum perkawinan melihat kejadian di masyarakat tentang fenomena sosial yang menjadi peristiwa hukum terkait dengan maraknya pemberitaan, baik melalui media televis, radio, online maupun media cetak tentang pasangan Asmirandah (24 Tahun) dan Jonas Rivanno (26 Tahun) yang merasa terusik dengan kabar mereka melangsungkan pernikahan pada 17 Oktober 2013. Sesuai pernyataan mereka berdua dalam jumpa pers di kediamannya, selasa 29 Oktober 2013 untuk mengklarifikasi kabar tersebut.¹²

¹¹ Abd. Syakur Dj, Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia dilengkapi pandangan Menurut Agama Islam dan Kristen* (Tangerang:Lentera Hati, 2014), h.121

¹² Asmirandah, Jonas Rivano, *Berharap bersatu dan bahagia*, Nova 1341. 4-10 November 2013. Hlm. 4

Ada hal yang disembunyikan sehingga mengusik awak media dan masyarakat untuk mencari tahu kebenaran kabar yang berkembang. Akan tetapi mereka berdua sepakat menyampaikan bantahan langsung soal berita antara Asmirandah dan Vanno (nama panggilan) katanya: “jangan menikah, mendaftar di KUA pun belum dilakukan...rencana akan menikah pada Januari 2014”¹³

Meskipun pada perkembangan berikutnya memasuki tahun 2014, menjadi kenyataan yang berbalik, bahwa Asmirandah keluar dari agama Islam dan mengikuti agama kristen Jonas. Timbul lagi dimana keabsahan perkawinan mereka, semula menikah dengan tatacara Islam, Jonas masuk Islam dan dilakukan prosesi pernikahan secara Islam, kemudian Jonas kembali keagamanya. Sementara Asmirandah pada akhirnya menyerah dan mengikuti agamanya Jonas. Lantas status perkawinan mereka secara legalitas menjadi pertanyaan.¹⁴

Pernikahan beda agama banyak menimbulkan polemik ditengah masyarakat Indonesia yang plural, ada yang berpendapat tidak diperbolehkannya nikah beda agama adalah untuk kemaslahatan umat tapi ada pula yang berpendapat ketentuan undang-undang pernikahan mengenai menikah hanya dengan yang seagama atau satu kepercayaan, itu melanggar hak asasi manusia dalam konstitusi. Dalam agama islam pun terjadi perbedaan pendapat karena surat al-Maidah ayat 5, membolehkan pria muslim menikah dengan perempuan ahli kitab.

Selanjutnya MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa Nomor 05/Kep/MunasII/MUI/1980 pada tanggal 1 Juni 1980 tentang Larangan Perkawinan Beda Agama, yang kemudian diakomodir

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Disampaikan M.Wagianto dalam diskusi dosen Fakultas Syari'ah berjudul *Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Kajian peristiwa hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok). (Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan,2013). h.22 pada Kamis 5 Nopember 2013

Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI.¹⁵ Pada tanggal 28 Juli 2005, MUI mengeluarkan kembali fatwa larangan perkawinan beda agama melalui Fatwa Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005.¹⁶

Pada Tahun 2014, beberapa mahasiswa dan Konsultan Hukum mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang undang perkawinan Pasal 2 ayat (1). Di dalam undang tersebut memang tidak mengatur bagaimana perkawinan beda agama, akan tetapi pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Permohonan uji materi pada Tahun 2014 dengan perkara No. 68/PUU-XII/2014 berikut nama-nama pemohon yang mengajukan gugatan ke mahkamah kosntitusi sebagai berikut :

1. Damian Agata Yuvens, sebagai Pemohon I;
2. Rangga Sujud Widigda, sebagai Pemohon II;
3. Anbar Jayadi, sebagai Pemohon III;
4. Luthfi Saputra, sebagai Pemohon IV.¹⁷

Didalam isi permohonan tersebut pemohon bermaksud untuk mengadakan pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945. Alasan uji materiil di dalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD N RI 1945
2. Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.228

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Op.Cit.*, Putusan MK No.68/PUU-XII/2014, h.1-2

- 28B ayat (1) UUD 1945;
3. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; dan
 5. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;¹⁸.

Petition pengajuan *Judicial Review* nya, para pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai' dan menyatakan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sepanjang tidak dimaknai atau penambahan frasa 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran menurut hukum agamanya dan

¹⁸ *Op.Cit.*, Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 h.15-

kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai'.¹⁹

Permasalahan yang timbul jelas mengenai keabsahan pernikahan beda agama. Kemudian, permasalahan selanjutnya mengenai kewajiban administratif dalam perkawinan yaitu pencatatan. Permasalahan keabsahan dan kewajiban administratif ini adalah masalah yang timbul diawal perkawinan, sedangkan perkawinan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum antara hak dan kewajiban suami-istri ataupun orang tua dengan anaknya.

Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya tanggal 15 Desember 2014, menolak untuk keseluruhannya permohonan uji materi yang diajukan. Dan amar putusan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 Juni 2015.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami mengenai pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) yang akan berdampak pada pernikahan beda agama. Penulis menggunakan konsep perbandingan dari hukum islam dan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Maka kajian ini berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama?.
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama?.

¹⁹ *Op.Cit.*, Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 h.58

²⁰ *Ibid.*, h.154

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 terhadap penambahan frasa Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu tentang Pernikahan Beda Agama.
- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis (Keilmuan)

Pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, semoga dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan pelaksanaan pengujian Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014).

b. Secara Praktis (Bagi masyarakat)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Hukum Keluarga di setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah, dan menjadi salah satu acuan pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia, dalam bidang perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah tersebut, menetapkan hukum dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut,

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini mencakup penelitian pada taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal sesuai dengan hirarki perundang-undangan maupun undang-undang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Dalam hal ini, penelitian ini ditelaah dengan mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama, yaitu literatur sekunder

²¹ Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung : Taruna Grafika, 2000),h.38.

yang jadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi sumber data sekunder, yaitu :

a. Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan adalah berasal dari beberapa bahan hukum, yakni berupa :

1. Bahan hukum primer berupa Putusan MK No.68/PUU-XII/2014, Al-Qur'an, Hadits, UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA.
2. Bahan hukum sekunder berupa Tafsir Al-Qur'an, fatwa MUI, kitab fiqh, buku mengenai hukum perkawinan, fatwa organisasi keagamaan, pendapat pakar hukum jurnal konstitusi dan jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, koran, majalah, karya tulis dan artikel baik cetak ataupun online yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.²² Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, UU Perkawinan, UU Adminduk dan Catatan Sipil, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986, jurnal konstitusi dan jurnal hukum.

4. Teknik Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan :

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Andy Offset, 1997), h.9

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
 - b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
 - c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²³
5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-analitis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Penulis menggunakan pula metode berpikir induktif yaitu penjabaran dari khusus ke umum.

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107.

BAB II

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam

Pernikahan beda agama yang dibahas di skripsi ini, harus dipahami sebagai fenomena sosial yang terjadi setelah turunnya Al-Qur'an hingga masa kini. Sebelum jauh memahami pernikahan beda agama dalam hukum Islam, akan dijabarkan beberapa hal yang mendukung, yaitu :

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan secara etimologi bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²⁵ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁶ Secara etimologi “*Al wath'u wa ad dhammu*” artinya bersenggaman atau bercampur.²⁷

Pada literature fiqh Islam, yang sesungguhnya semata-mata merupakan kata turunan dari istilah yang digunakan Al-Qur'an dan Hadits, perkawinan lazim diistilahkan dengan sebutan *an-nikâh* (النكاح) atau *at-tazwîj* (

التزويج).²⁸

²⁴ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi kedua, h. 456.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012) h. 7

²⁶ *Ibid*

²⁷ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003) hal. 1-2

²⁸ Abd.Syakur, Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia* (Tanggerang: Lentera Hati, 2014), cet. 1, h. 186.

Kata nikah dalam Al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, Q.S. An-Nisa' (4) : 3 yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*²⁹

Sedangkan ayat yang menyebut untuk suatu hubungan seksual³⁰ adalah firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 230 yaitu :

²⁹ Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Diponogoro, 2012), h.99

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.35-38.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ³¹
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ³² وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³¹

Anwar harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah Bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqoha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang adanya hubungan kelamin.³² Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk meleagalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.³³

Pada kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata ‘munakahat’ mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya

³¹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.46

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.9

³³ Abd.Syakur, *Loc.Cit.*h.10

melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.³⁴

Nikah didalam istilah fikih, yang dikemukakan oleh para fuqoha ada diantaranya :

- a. Zakaria al-Ansari mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya persetubuhan dengan lafadz nikah dan sejenisnya.
- b. Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazaly, nikah adalah suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat nikah.
- c. Ahmad bi Ali-Anshari, nikah adalah suatu rumusan dri akad-akad syara' yang disunatkan berdasarkan atas pokok pokok syara'.
- d. Menurut Syaikh Taqiyudin, nikah merupakan suatu rumusan dari akad yang masyhur mencakup atas rukun-rukun dan syarat-syarat.
- e. Menurut Syaikh Zainudin Ibnu Abd. Al-Aziz, nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh dengan lafadz "nikah atau *tazwij*".³⁵

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan, diantaranya adalah :

الرَّوَّاجُ شَرْعاً هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَا عِ
الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَا عِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.³⁶

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11

³⁵ Wagianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum", (Semarang : Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010), h.99.

³⁶ Rahmat Hakim, *Loc.Cit.* h.12

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ
نَحْوِهِ.³⁷

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوَّلِ التَّزْ
وِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.³⁸

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.³⁹

Sehubungan dengan keterkaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

³⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz 2, h.30.

³⁸ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.37.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h.9

عَقْدٌ يُعَيِّدُ حَلََّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا
وَيُحَدِّدُ مَالَكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (Suami Istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Pengertian dari perkawinan ini mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁴⁰

Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “an-nikah” atau “at-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah, binatang pun melakukan pernikahan.

Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan kata “perkawinan” meskipun istilah tersebut tidak mutlak, Karena dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah”

⁴⁰ *Ibid*, h.10

adalah Bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.⁴¹

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian, ia mengandung adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dengan demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak melangsungkan perkawinan.⁴²

Perjanjian dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁴³

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh Karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqon ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.11

⁴² Abdul Rahman, *Op. Cit*, h.14

⁴³ *Ibid.*

menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁴⁴

Pengertian yang dikemukakan mutaakhirin selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴⁵

Pada kompilasi hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3).⁴⁶

Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari : Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.15.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995), h.114

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁴⁷

2. Dasar Hukum Melaksanakan Perkawinan dalam Hukum Islam

Dasar hukum dilaksanakannya suatu perkawinan akan dipaparkan melalui Al-Qur'an dan Hadits yaitu :

- a. Sumber Hukum Perkawinan dalam Al-Qur'an

Adapun dasar disyariatkannya perkawinan terdapat firman Allah Swt dalam Al-Qur'an diantaranya :

- 1) Q.S. An-Nur (24) : 32, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ^ج إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ ۖ مِنْ

فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.5

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”⁴⁸

2) Q.S. ar-Rum (30) : 21 , yaitu :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴⁹

3) Q.S. an-Nisa (4) : 1, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁴⁸ Kementrian Agama RI., *Op. Cit.* h.494

⁴⁹ *Ibid.*, h.407

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁵⁰

4) Q.S. an-Nahl (16) : 72, yaitu :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِلَا بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِإِنْعَمَ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁵¹

5) Q.S. Ar-Radd (13) : 38, yaitu :

⁵⁰ Ibid, h.99

⁵¹ Ibid, h.374

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا

وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”⁵²

Pada ayat-ayat yang dikemukakan di atas, Allah SWT menjadikan istri-istri untuk manusia (termasuk rasul-Nya) dengan tujuan agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan sebagai generasi penerus. Dalam hal ini, apa yang diperoleh dalam perkawinan tersebut harus sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan Allah SWT yaitu melalui perkawinan yang sah dan diridhai Allah SWT. Dengan demikian, secara tersirat, penciptaan istri-istri itu adalah sebagai realisasi dan perwujudan dari anjuran perkawinan dengan berbagai faedah dan tujuannya.⁵³

- b. Sumber Hukum Perkawinan dalam Hadits
Beberapa hadist mengemukakan pentingnya pernikahan, yaitu :

⁵² Ibid., h.343

⁵³ Dedi Junaedi, *Op.Cit.*,h. 10-11

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : (يَامَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
 , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁵⁴

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami : "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.⁵⁵

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ
 , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁵⁶

Artinya : Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.⁵⁷

⁵⁴ Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marom*, (Surabaya; Nurul Huda, t.t). h.208

⁵⁵ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom*, (Semarang; Dahara Prize, 2014), h.224

⁵⁶ Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*,

⁵⁷ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ , وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حَبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ⁵⁸

Artinya : *Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. Hadits itu mempunyai saksi menurut riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil Ibnu Yasar.*⁵⁹

3. Anjuran untuk Memilih Pasangan

Anjuran memilih pasangan, alangkah lebih baik dari segi agama terlebih dahulu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 13 yaitu:

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ... ﴿١٣﴾

Artinya : “...Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu...”⁶⁰

⁵⁸ Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*,

⁵⁹ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*

⁶⁰ Kementrian Agama RI., *Op. Cit.* h.745

Allah pun berfirman, dalam Q.S. An-Nisaa ayat 34 yaitu :

...فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

Artinya : "...Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..."⁶¹

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ⁶²

Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.⁶³

Hadits ini menerangkan bahwa bukan berarti kecantikan itu tidak diperlukan, tetapi yang dimaksud ialah jangan membatasi pada kecantikan. Karena itu bukan prinsip bagi kita dalam memilih isteri, pilihlah karena agamanya; dan jika tidak, maka engkau tidak akan bahagia. Yakni, berlumuran dengan tanah berupa aib yang bakal terjadi

⁶¹ Ibid., h.108-109

⁶² Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.* h.209

⁶³ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Marom, Op.Cit.*, h.224

padamu setelah itu disebabkan isteri tidak mempunyai agama.⁶⁴

Pendapat Abdullah bin ‘Amr secara *marfu*, ia mengatakan : “Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkannya; dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi, nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik”.⁶⁵

Syaikh al-‘Azhim Abad berkata : “Makna *‘fazhfah bidzaatid diin* (ambillah yang mempunyai agama)’ bahwa yang pantas bagi orang yang mempunyai agama dan adab yang baik ialah agar agama menjadi pertimbangannya dalam segala sesuatu, terutama berkenaan dengan pendamping hidup. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan supaya mencari wanita yang beragama yang merupakan puncak pencarian. *Taribat Yadaaka*, yakni menempel dengan tanah.”⁶⁶

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Pemahaman mengenai rukun dan syarat sah perkawinan, harus terlebih dahulu dipahami tentang pengertian rukun dan syarat. “Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan”. “Syarat, yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki/perempuan itu harus

⁶⁴ Abu Hafsh Usamah, Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h.90

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid*

beragama Islam”. “Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat”.⁶⁷

Rukun menurut kalangan ulama Hanafiah adalah sesuatu yang sangat bergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan ia (sesuatu itu) secara substantif merupakan bagian integral dalam hakikatnya; sedangkan syarat menurut mereka (ulama hanafiah) adalah sesuatu yang atasnya bergantung keberadaan sesuatu yang lain, namun sesuatunya itu sendiri bukanlah merupakan bagian integral dari hakikat sesuatu itu.⁶⁸

Persyaratan dan rukun, memang tidak seorangpun fuqoha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqoha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan.

Tentang jumlah rukun nikah ini Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima :

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon Pengantin Laki-Laki
- d. Calon Pengantin Perempuan
- e. *Sighat* akad nikah.⁶⁹

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan rukun perkawinan :

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab Kabul.⁷⁰

⁶⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikah Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2009), h.11

⁶⁸ Abd.Syukur Dj. Dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tangerang; Literati, 2014), h.204-205

⁶⁹ Khoirul Abror, *Op. Cit.*, h.52-53.

⁷⁰ H.Abdurrahman, *Op.Cit.*, h.

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.⁷¹

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan poin 1 kewajiban menyerahkan bukan merupakan rukun dalam perkawinan.⁷²

Wagianto menjelaskan⁷³, syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang menjadikan sahnya perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat rukun sebagai berikut :

- a. Calon suami, syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas bahwa laki-laki
 - 3) Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena paksaan)
 - 4) Tidak beristri
 - 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri
 - 6) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- b. Calon istri, syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Jelas bahwa ia seorang perempuan
 - 3) Mendapat ijin dari walinya
 - 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
 - 6) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
 - 7) Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karna paksaan oleh siapapun.
 - 8) Jelas ada orangnya
 - 9) Tidak sedang berihram haji/umrah
- c. Syarat-syarat sighthat

⁷¹ *Ibid.*, h.

⁷² *Ibid*, Pasal 34

⁷³ Wagianto, *Op. Cit.*, h.122-124

- 1) Dengan lafadz tazwij atau nikah
 - 2) Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
 - 3) Kesiambungan ijab dan kabul
 - 4) Tidak dibatasi waktu
 - 5) Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai Kabul.
- d. Syarat-syarat wali
- 1) Islam adil
 - 2) Baligh dan berakal
 - 3) Tidak dalam pengampuan
 - 4) Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran.
- e. Syarat-syarat Saksi
- 1) Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Adil
 - 4) Dapat mendengar dan melihat.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁷⁴, antara lain:

- a. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).
- b. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
- c. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai.
- d. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
- e. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- f. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
- g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah saw, yaitu hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas, lalu pada

⁷⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), Cet. V, hlm. 58-59

batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

1. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia dengan khaliknya.
2. Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalulintas pergaulannya terhadap sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.
3. Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
4. Rub'al-jinayat yang menata pengamanan dalam suatu tata tertib pergaulan yang menjadi ketentrannya.⁷⁵

Menurut Khoirul Abror⁷⁶, dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian tujuan perkawinan yang relevan dan disadarkan kepada Al-Qur'an yaitu :

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, disebutkan dalam Q.S. ar-Rum (30) : 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*⁷⁷

⁷⁵ Timami dan Sohari Sarhani, *Op.Cit.*, h.15.

⁷⁶ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.59

⁷⁷ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.572.

2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam⁷⁸, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa'(4):1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*⁷⁹

3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)⁸⁰, sebagaimana difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 187 yaitu :

⁷⁸ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.60.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.99

⁸⁰ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.60

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ
 لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ
 فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا ۚ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا
 تُبَشِّرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۚ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari
 bulan puasa bercampur dengan isteri-
 isteri kamu; mereka adalah pakaian
 bagimu, dan kamupun adalah pakaian
 bagi mereka. Allah mengetahui
 bahwasanya kamu tidak dapat menahan
 nafsumu, karena itu Allah mengampuni
 kamu dan memberi ma'af kepadamu.
 Maka sekarang campurilah mereka dan
 ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah
 untukmu, dan Makan minumlah hingga
 terang bagimu benang putih dari benang
 hitam, Yaitu fajar. kemudian
 sempurnakanlah puasa itu sampai

(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”⁸¹

4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan⁸², terdapat dalam Q.S. an-Nur (24) ayat 33 yaitu :

وَلَيْسَتَعَفِيفُ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ
مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى
الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka,

⁸¹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.36.

⁸² Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.61.

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”⁸³

5. Bertujuan ibadah⁸⁴, hal ini dapat dipahami dalam Q.S. az-Zariyat (51) ayat 56 yaitu :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁸⁵

6. Mempunyai tujuan perlindungan anak dalam keluarga⁸⁶, tertera dalam Q.S. an-Nisa (4) : 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

⁸³ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.494.

⁸⁴ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.61.

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.756.

⁸⁶ Wagianto, *Op.Cit.*, h.115-116.

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”⁸⁷

7. Membina cinta dan kasih sayang penuh romantika, kedamaian, toleransi yang tulus ikhlas diletakan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi⁸⁸, Q.S. ar-Rum (30) : 21 yaitu :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁹

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, yang berbicara tentang tujuan perkawinan yang bertujuan untuk menata subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu-bapak lah yang dikenal mula pertama oleh putra-putri nya dengan segala perlakuan yang diterima dan

⁸⁷ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.101

⁸⁸ Tihami dan Sohari Sarhani, *Op.Cit.*, h.17

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.572.

dirasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁹⁰

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁹¹

6. Pendapat Ulama Mengenai Perkawinan Beda Agama

Pemahaman hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: Pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik; Kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan Ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab)⁹²

Pertama: Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

⁹⁰ Wagianto, *Op.Cit.*, h.117.

⁹¹ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,2004), h.26-27.

⁹² Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke XXII, 1989, Malang Jawa Timur, h 302

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^ج وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيَّةٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
 يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”⁹³

Kemudian dalam surat al-Mumtahanah (60) : 10, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ
 فَاِمْتَحِنُوهُنَّ^ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ^ط فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ

⁹³ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h.43.

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ
فِي حُكْمِ بَيْنِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁹⁴

⁹⁴ Ibid.,h.803

Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara laki-laki muslim dengan musyrikah maupun antara laki-laki musyrik dengan seorang musyrikah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaimana yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nasrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.⁹⁵

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat menanggapi permasalahan tersebut. Dari perbedaan pendapat itu sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Hosen terdapat tiga pendapat yaitu : Pendapat pertama mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) halal hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama dari kalangan madzhab empat, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, Salman Dan Jabir. Demikian pendapat kedua mengatakan menikahi wanita ahli kitab haram hukumnya. Demikian pendapat Ibn Umar, Syi'ah

⁹⁵ Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Muassah Ar-Risalah, 2000, III: 711-713,

Imamiyah dan Zaidiyah. Pendapat ketiga mengatakan menikahi wanita ahli kitab halal hukumnya tetapi siasat tidak menghendakinya. Demikian pendapat sebagian ulama di antaranya Umar Ibn Al-Khaththab.⁹⁶

Pada literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut atau paling tidak mereka hanya menganggap makruh, Pendapat pertama berargumentasikan pada QS. Al-Maidah ayat 5 yaitu :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang

⁹⁶ Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*, (Bandar Lampung; Anugrah Utama Raharja; 2015) h. 107-108

*yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.*⁹⁷

Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Naylah bint Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya/ melarangnya.⁹⁸

Pendapat kedua berargumentasikan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10, yang menunjukkan dengan jelas pria muslim dilarang menikahi wanita-wanita kafir. Sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria).⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*,h.143.

⁹⁸ Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, (t.t : t.t , t.t) VI: 364,

⁹⁹ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-manar*, (t.t : t.t , t.t) VI: 180

Suatu riwayat menjelaskan sebagai dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa Ibn Umar pernah berkata tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar dosanya kecuali wanita yang mengatakan Isa (Yesus Kristus) sebagai Tuhan atau sebagai oknum Tuhan.

Pendapat ketiga berargumentasikan pada ungkapan Umar Ibn Al-Khathtab, bahwa Umar pernah berkata kepada para sahabat Nabi yang menikahi wanita ahli kitab “ceraikanlah mereka itu” Perintah Umar ini dipatuhi oleh para sahabat tersebut kecuali Hudzaifah. Umar mengulangi lagi perintahnya agar Hudzaifah menceraikan isterinya. Kemudian Hudzaifah berkata : Maukah engkau menjadi saksi bahwa menikahi ahli kitab haram hukumnya.? Umar berkata : Dia akan menjadi fitnah, “ceraikanlah”. Hudzaifah menyahut lagi : Maukah engkau menjadi saksi bahwa ia haram.? Umar menjawab lagi dengan singkat : “Ia adalah fitnah”. Akhirnya Hudzaifah berkata : Sesungguhnya saya tau bahwa ia adalah fitnah tetapi ia halal bagiku. Setelah Hudzaifah meninggalkan Umar, barulah isterinya ditalak.¹⁰⁰

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 221 (Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu...).¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.,,*

¹⁰¹ *Ibid.,*

Berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, ulama sepakat bahwa komunitas Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab. Walaupun demikian, mereka tidak sepakat mengenai perinciannya. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dimaksud Q.S. Al-Ma'idah (5) : 5 adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel; karena Nabi Musa dan Nabi Isa diutus khusus kepada mereka.¹⁰²

Pendapat ulama lainnya lebih luas, Al-Syahrastani berpendapat bahwa Ahli Kitab mencakup Yahudi dan Nasrani tetapi tidak terbatas pada keturunan Israel. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud Ahli Kitab adalah seluruh kelompok manusia yang memercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah (tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani). Muhammad Abduh berpendapat bahwa al-Shabi'in termasuk Ahli Kitab. Murid Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat lebih jauh. Ia berpendapat bahwa Majusi, Sabi'in, penyembah berhala di India dan Cina (Hindu dan Budha, pen.) termasuk Ahli Kitab karena kitab-kitab mereka mengandung ajaran tauhid.¹⁰³ Pendapat ulama mengenai cakupan Ahli Kitab termasuk wilayah ijtihad yang sangat mungkin berubah dan berbeda pendapat diantara ulama sendiri.¹⁰⁴

Pakar fikih dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan Ahli Kitab adalah makruh karena Umar Ibn al-Khaththab menganjurkan agar para sahabat (yang menikahi perempuan Ahli Kitab) menceraikan istri-istrinya yang

¹⁰² H.Nasroen Haroen (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h.46.

¹⁰³ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Kairo Dar Al-Manar, 1367 H, II; 347.

¹⁰⁴ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), h.116.

berasal dari kalangan Ahli Kitab.¹⁰⁵ Kemudian akan dijabarkan, pendapat ulama-ulama nusantara atau ulama di Indonesia yang menjadi rujukan lewat lembaga atau organisasi keagamaan yang mengeluarkan fatwa, yaitu :

a. Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama

Pada musyawarah Nasional II pada 26 Mei-1 Juni 1980 (11-17 Rajab 1400 H), MUI menetapkan fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. Dalam fatwa MUI tentang perkawinan campuran terdapat empat ayat Al-Qur'an dan dua buah hadits yang dijadikan alasan.

Pertama, Q.S. al-baqarah (2) : 221 tentang cegahan bagi laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan musyrik dan cegahan bagi wali untuk menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki dari kalangan orang musrik. Kedua, Q.S. al-Ma'idah (5) : 5 tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab. Walaupun demikian, MUI tidak menjelaskan cakupan Ahli Kitab yang dalam ayat tersebut, sebagaimana telah diperdebatkan oleh pakar fikih sebelumnya.

Ketiga, Q.S. al-Mumtahanah (60):10 tentang cegahan bagi orang-orang beriman untuk mengembalikan perempuan dari kalangan muslimah kepada suami mereka yang berasal dari kalangan orang kafir Karena perempuan muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki yang kafir, dan laki-laki muslim dilarang memperthankan perkawinan dengan perempuan dari kalangan kafir. Keempat, Q.S. at-Tahrim (66) : 6 tentang perintah bagi orang-orang beriman untuk memelihara dan menjaga diri sendiri serta keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawanya kepada siksa neraka.

Kelima, sabda Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani tentang nikah sebagai bagian (setengah) dari ajaran agama dan kita diperintahkan berhati-hati terhadap sisanya yang lain. Keenam, sabda Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan

¹⁰⁵ *Ibid.* h.117

oleh Imam Al-aswad Ibn al-Sura'I tentang pentingnya pendidikan agama yang dilakukan oleh orang tua (ibu-bapak) terhadap anak-anaknya Karena merekalah yang me membuat anaknya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan empat ayat Al-Qur'an dan dua buah hadits Nabi Muhammad Saw., MUI dalam Munas II memfatwakan bahwa : pertama, hukum perkawinan perempuan dari kalangan muslimah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam adalah haram; dan kedua, hukum perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang bukan dari kalangan muslimah (termasuk dengan perempuan dari kalangan ahli kitab) adalah haram.¹⁰⁶ Setelah mempertimbangkan maslahat-mafsadat, MUI berkesimpulan bahwa mafsadat yang akan ditimbulkan dari perkawinan muslimah (termasuk dengan perempuan dari kalangan Ahli Kitab), lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Dengan demikian, MUI menetapkan keharaman perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atas dasar pertimbangan mashlahat.

b. Keputusan NU tentang Perkawinan Beda Agama

Salah satu keputusan Mukhtamar NU dipondok pesantren krapyak adalah hukum perkawinan beda agama. Berdasarkan Himpunan Keputusan Bathsul Masa'il PWNU Jawa Timur, keputusan tersebut diperkirakan ditetapkan antara 1979-1986. Dengan demikian, keputusan BM-NU tentang pernikahan beda agama juga merupakan respons terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat 1.

Perjalanan secara historis, BM-NU telah menetapkan hukum perkawinan beda agama sejak 1962 (jauh sebelum pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu Mukhtamar NU 1962 dan

¹⁰⁶ H.A. Nazri Adlani (Penyunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997), h.120-122

keputusan tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Mukhtamar Thariqah Mukhtabarrah 1968.¹⁰⁷ NU menetapkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah, dan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki muslim, adalah tidak sah. Alasan yang digunakan adalah pendapat ulama yang terdapat dalam enam kitab : (1) *al-Syarqâwi: Syarah dan Matannya*; (2) *al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi 'I karya al-Syirazi*; (3) *al-Umm karya Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i*; (4) *Ahkam al-Fuqohâ*; (5) *al-Majmû Syarh al-Muhadzdzab karya al-Nawawi*; dan (6) *Tanwîr al-Qulûb*.¹⁰⁸

c. Fatwa Muhammadiyah tentang Perkawinan Beda Agama

Pada 1990 diadakan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dalam menetapkan hukum perkawinan antar agama, Majelis Tarjih menjadikan tujuh ayat al-Qur'an, dan satu kaidah fikih sebagai dalil hukum.

Pertama, Q.S. al-Baqarah (2) : 120 tentang cegahan mengikuti Yahudi dan Nasrani; Karena Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida kepada kita, kecuali setelah kita mengikuti agama mereka. Kedua, Q.S. al-Ma'idah (5) : 72-73 tentang penegasan Allah bahwa seseorang atau kelompok orang yang meyakini bahwa al-Masih Ibn Maryam adalah Allah dan Allah adalah salah seorang dari yang tiga (trinitas), termasuk orang-orang kafir dan musyrik.

Ketiga, Q.S. Ali-Imran (3) 113 tentang adanya keyakinan dan perbuatan Ahli Kitab, sebagian Ahli Kitab masih ada yang berlaku lurus¹⁰⁹, yaitu beriman

¹⁰⁷ K.H.Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan : Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama* (Surabaya; PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, 1977), h.340

¹⁰⁸ K.H.Abdul Aziz Masyhuri, *Op.Cit.*, h.123

¹⁰⁹ Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ahli Kitab

kepada Allah dan hari akhir, melakukan amar ma'ruf dan nahyi munkar, serta bersegera dalam berbuat baik.¹¹⁰ Keempat, Q.S. al-Bayinah (98) : 1 dan 6 tentang pernyataan Allah bahwa orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka kecuali setelah datang bukti (rasul Allah dan kitab); dan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrik akan ditempatkan di neraka selamanya.

Kelima, hadis Nabi Muhammad Saw, yang menjelaskan empat pertimbangan dalam menikah: (1) harta, (2) keturunan atau nasab; (3) kecantikan; (4) agama. Agama harus dijadikan pertimbangan utama dalam melakukan pernikahan.¹¹¹ Keenam, kaidah fikih yang digunakan adalah *sadd al-dzari'at*, yaitu meninggalkan sesuatu yang akan membawa kerusakan lebih diutamakan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat (*dar'al-mafâsid muqaddam 'ala jalb al-mashâlih*).

Setelah mempertimbangkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan kaidah fikih, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa : (1) laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan bukan muslimah; dan (2) perempuan muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, Putusan ini dipengaruhi oleh pertimbangan maslahat-mafsadat, seperti dilakukan oleh MUI dalam Musyawarah Nasional II pada 26 Mei-1 Juni 1980 dalam menetapkan perkawinan campuran.¹¹²

Pada laporan seksi 1 (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah) Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah (11-16 Februari 1989 atau 6-10 Rajab

yang berkeyakinan dan berlaku lurus adalah Ahli Kitab yang telah memeluk agama Islam. Lihat catatan kaki nomor 221.

¹¹⁰ Lihat Q.S. Ali Imran (3) : 114

¹¹¹ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Awthâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr min Ahâdits al-Akhbar*, vol.VI (Mesir : Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1347 H), h.90

¹¹² Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, h.120.

1409 H) di Malang diterangkan mengenai tiga penafsiran penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum perkawinan beda agama. Pertama, penafsiran yang berhubungan dengan keyakinan: (1) sejak Nabi Muhammad Saw menjadi rasul, tidak ada agama yang harus dianut kecuali Islam; (2) sejak kerasulan Nabi Muhammad Saw, tidak ada lagi Ahli Kitab; (3) semua penganut selain agama Islam adalah musyrik dan kafir. Dengan penafsiran tersebut sebagai pertimbangan, akhirnya Majelis Tarjih menetapkan bahwa perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam adalah haram.¹¹³

Kedua, dilihat dari segi *maslahat-mafsadat*, peserta muktamar menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan bukan muslimah akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, yaitu mendidik anak-anaknya secara Islam karena kesempatan bergaul anak-anak lebih banyak dengan ibunya. Kesulitan itu akan diperparah lagi apabila istrinya (ibu anak-anak) masih fanatik terhadap agamanya.¹¹⁴ Ketiga, peserta muktamar mengusulkan agar setiap orang yang akan masuk Islam hendaknya diteliti maksud dan tujuannya yaitu, apakah karena kebenaran Islam dalam keyakinannya atau untuk melakukan perkawinan. Peserta muktamar menetapkan dua hal: (1) laki-laki yang masuk Islam Karena ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan muslimah, harus ditolak; dan (2) perempuan yang memeluk Islam karena akan menikah dengan laki-laki dari kalangan muslim, maka laki-laki yang menikahnya berkewajiban membinanya secara Islam.¹¹⁵

¹¹³ Dalam Laporan seksi I (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah) Muktamar Majelis Tarjih Muhamaddiyah (11-16 Februari 1989 atau 6-10 Rajab 1409 H) di Malang. H.44

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*,.h.120

Masukan-masukan dari peserta muktamar juga dilengkapi dengan kaidah lain yang dijadikan alasan, yaitu hukum berkembang dan berubah karena perkembangan serta perubahan zaman dan tempat (al-hukm yadûr ma'a al-zamân wa al-makân). Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan perkawina laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah (termasuk ahli kitab) dan perkawinan seorang laki-laki yang masuk Islam (karena perkawinan semata) dengan perempuan muslimah atas dasar pertimbangan maslahat-mafsadat secara sosial, yaitu perkawinan sering kali dijadikan media oleh orang bukan muslim untuk melakukan pemurtadan.

Sejalan dengan keputusan Muhammadiyah mengenai perkawinan antar agama (beda agama) dipengaruhi oleh dua pertimbangan: (1) pertimbangan akademis, mereka menetapkan bahwa Yahudi dan Nasrani yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sudah tidak ada lagi setelah kerasulan Muhammad Saw,; dan (2) pertimbangan sosiologis, yaitu pemurtadan terhadap muslimah yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam.

d. Pendapat A.Hassan dan Persis Tentang Perkawinan Beda Agama

Pendapat A.Hassan menanggapi dua pertanyaan yang berada dalam satu topik perkawinan beda agama, yaitu pertanyaan mengenai hukum seorang Nasrani kawin dengan muslim, dan hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan bukan muslimah. Dalam menjawab dua pertanyaan hukum seorang laki-laki Nasrani menikah dengan perempuan Muslim dan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan bukan muslimah, A. Hassan menjadikan Q.S. al-Ma'idah (5) : 5 tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan Ahli Kitab sebagai dasar argumentasinya. Berdasarkan ayat tersebut, A.Hassan menjelaskan bahwa laki-laki muslim

diperbolehkan menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan Ahli Kitab.

Setelah itu, A.Hasan menambahkan argumentasinya dengan menjelaskan bahwa Hudzaifah Ibn al-Yaman menikahi perempuan yang bukan dari kalangan muslimah. Menurutnya, perbuatan sahabat Nabi Saw yang menikahi perempuan bukan dari kalangan muslimah itu menguatkan Q.S. al-Ma'idah (5) : 5 tersebut. Selanjutnya A. Hasan menjelaskan bahwa laki-laki yang bukan beragama Islam tidak dibenarkan atau tidak sah menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan muslimah karena hal itu tidak dibenarkan Al-Qur'an, sunah dan tidak ada contoh dari sahabat Nabi Saw., yang berupa amaliah atau perbuatan.¹¹⁶

Yusuf Badri menjelaskan bahwa Persis berkesimpulan : (1) hukum pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki bukan muslim adalah haram; dan hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab adalah boleh atau halal; (2) akan tetapi, karena perkawinan yang dilakukan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab atau sebaliknya sering dijadikan alat oleh orang-orang yang bukan Islam untuk melakukan pemurtadan, Persis menetapkan bahwa pernikahan beda agama harus di jauhi dan akhirnya ditetapkan bahwa hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan dari kalangan Ahli Kitab juga haram.¹¹⁷

B. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Positif

Sejak keambrokan Orde Baru, sebagian produk penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan semakin menjauh dari roh ideologi bangsa, bahkan

¹¹⁶ A.Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung; CV. Dipoenegoro, 1988) h.263-264

¹¹⁷ Yusuf Badri, *Fatwa Ulama Ormas Islam tentang Pernikahan Beda Agama (MUI, Muhammadiyah, Persis dan NU)* (Bandung: PPs UIN SGD, 2004), tesis Magister, h.188-189.

sebagian orang mengatakan cacat ideologis. Cacat ideologis dimaksud adalah sebagian produk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya hingga aturan daerah di daerah-daerah terkesan tercerabut dari fakta keberagaman sosial, budaya, agama, suku bangsa, dan norma-norma lokal nusantara yang menjadi karakter masyarakat asli yang dimiliki bangsa Indonesia.¹¹⁸

Pernikahan itu diatur di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu diatur dalam Undang-Undang peninggalan penjajah. Setelah merdeka, dan Indonesia menganut ideologi Pancasila. Peraturan yang mengatur mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan beberapa tahap sebelum disahkan. Pernikahan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹¹⁹ Pernikahan beda agama merupakan salah satu permasalahan yang mengalami pro kontra yang tak kunjung usai. Mereka yang memilih hidup dengan pasangan beda agama dipandang penulis, merasa termarginalkan dengan peraturan yang ada di Indonesia padahal diberi kebebasan dengan adanya Pasal 35 Adminduk. Dan mereka mengupayakan eksistensi dan legalitas nya dengan pengajuan di MA, draft CLD-KHI, bahkan ke MK dengan judicial review. Maka sebelum itu, akan di jabarkan beberapa hal yang mendukung yaitu :

1. Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu ajaran penting dalam syari'at sehingga mendapat perhatian khusus dari kalangan ulama dan politikus muslim Indonesia. Sebelum merdeka, di Indonesia sudah ada dua lembaga perkawinan yang eksis (yaitu Kantor Urusan Agama

¹¹⁸Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstitusi sampai Implementasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h.38

¹¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada ; 2013) h.273.

[KUA] dan Pengadilan Agama [PA]), namun keduanya masih memerlukan hukum materiil dan formal. Sejak awal kemerdekaan, usaha pembentukan UU Perkawinan telah dilakukan.¹²⁰

Pada zaman kemerdekaan, telah dibentuk enam undang-undang yang secara langsung mengatur Peradilan Agama (struktur dan kekuasaannya), yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya Surat Keputusan dan Surat Pemeriksaan Pengadilan ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini diikuti dengan pemberlakuan sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Mahkamah Agung, termasuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.¹²¹

Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Sebelum berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum Agama.¹²²

¹²⁰ Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, h.53

¹²¹ *Ibid.*, h.54

¹²² Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440, h.290

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka teori *receptie* seperti yang diajarkan di zaman Hindia Belanda menjadi hapus sendirinya. Teori *receptie* adalah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam, apabila sesuatu hukum Islam telah nyata-nyata diresepsi oleh Hukum Adat. Adanya pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan ini menghilangkan keragu-raguan untuk menerima bahwa Hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum tanpa memerlukan bantuan atau peraturan Hukum Adat.¹²³

Munculnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Mahadi, telah sampailah ajal teori “iblis” *receptie* tersebut. Ia mengutip Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, hukum agama Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus mealui hukum adat dalam menilai apakah suatu perkawinan sah atau tidak. Jadi secara yuridis formal, hukum Islam dalam perkawinan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya telah berlaku.¹²⁴

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaanya, maka sejak 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongan nya masing-masing. Hal ini dengan tegas disebut dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-

¹²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 166

¹²⁴ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, h.20

ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier Stb. 1933 November. 74), Peraturan Ordonantie Campuran, Gerelinge op Desember Gemeente Huwelijk Stb. 1939 November. 158, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.¹²⁵

Di samping ketentuan tersebut diatas tentang masih tetap berlakunya hukum Perkawinan Islam bagi mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan ini, tetap berlaku menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹²⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali, bahwa UUP yang mulai berlaku efektif 1 Oktober 1975 mempunyai 3 (tiga) ciri khas kalau dibandingkan dengan Undang-Undang atau hukum perkawinan sebelumnya, yaitu :¹²⁷

- 1) Asasnya bahwa dalam UUP asasnya adalah Agama, Agama atau hukum agama yang dipeluk oleh seseorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- 2) Tujuannya sesuai dengan Pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, h.168.

¹²⁶ *Ibid.*,

¹²⁷ Nurul Hakim, t.t, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No.1 Tahun 1974 dan PPNo.10 Tahun 1983*, t.t, h.3.

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan yang menjadi hak dan kewajiban (kedua) orang tua.

- 3) Sifatnya, yakni mengangkat harkat dan dengan (kedudukan) kaum wanita yakni para istri dengan adanya ungkapan jelas dalam Undang-undang tersebut bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga wajib bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.¹²⁸

Persoalan yang muncul adalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan perkawinan bagi yang berbeda agama tidak ada ketentuannya baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka sebetulnya tujuan diadakan ketentuan tersebut diatas adalah untuk menghindari konflik hukum adat, antar hukum agama dan hukum antar golongan.¹²⁹

Melihat Pasal 40 dan 44 Kompilasi yang perlu diperhatikan adalah bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah

¹²⁸ Abdul Ghofur Anshory, *OP.Cit.*, h.179

¹²⁹ *Ibid.*,

merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomi bagi umat Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.¹³⁰

Apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak mungkin dapat dilakukan perkawinan, sebab tidak mungkin sekaligus dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.¹³¹ Karena bagaimanapun sifat universalnya aturan agama, antara yang satu dengan yang lain tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dan kaidah hukum yang mengatur tatacara, persyaratan dan rukun-rukun yang melandasi upacara perkawinan di antara agama-agama tadi. Sedang penentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing. Oleh karena itu jika terjadi perkawinan diantara dua pihak yang berlainan agama dan kepercayaannya mau tidak mau mereka harus menentukan pilihan salah satu agama dari kelainan agama yang mereka peluk.¹³²

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan kata lain, tafsiran

¹³⁰ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, h.276

¹³¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974, Peraturan Pemerintah No.9/1975*, (Medan : CV.Zahir Trading, 1975) ., h.14

¹³² *Ibid.*,.

dan penjabaran sudah dilakukan oleh MUI, Muhamaddiyah, NU dan Persis.¹³³

Pada 1991 telah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang memerlukan. KHI pada dasarnya merupakan penguatan terhadap keputusan ormas Islam mengenai pernikahan beda agama.¹³⁴

Kompilasi hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikah dengan perempuan karena salah satu dari tiga alasan¹³⁵ :

- 1) Perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain;
- 2) Perempuan yang bersangkutan masih berada dalam waktu tunggu atau iddah; dan
- 3) Perempuan yang bersangkutan tidak beragama Islam.

KHI dapat dipahami memberi ketentuan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan perempuan yang bukan muslimah (termasuk Ahli Kitab).¹³⁶ Dalam KHI juga ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam diharamkan menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.¹³⁷

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Draf Kompilasi Hukum Islam Tahun 2004

Pada 2004, Departemen Agama (Sekarang; Kementrian Agama) yang dimotori oleh Siti Musdah Mulia dan kawan-kawan telah menghasilkan Draf Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi.¹³⁸

¹³³ Jaih Mubarak, *Op.Cit.*,h.123

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40.

¹³⁶ *Loc.Cit.*

¹³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

¹³⁸ *Loc.Cit.*

Sebagaimana diketahui bahwa UDHR (*Universal of Human Right*) terdapat pasal yang menyatakan bahwa agama tidak menjadi penghalang keabsahan perkawinan.¹³⁹ Dalam UDHR ditetapkan :

“(1) Men and Women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its diddolution.”¹⁴⁰

Atas dasar UDHR tersebut, para perumus KHI Tahun 2004 menetapkan:

- 1) Perkawinan beda agama dibolehkan selama masih dalam batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan;
- 2) Perkawinan beda agama dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama masing-masing; dan
- 3) Kedua calon mempelai perlu memperoleh pengertian dan penjelasan mengenai perkawinan beda agama sehingga menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut, sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁴¹

2. Gambaran Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan Beda Agama di Indonesia bias dilihat dari maraknya penyelundupan hukum hingga yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :

a. Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama di Indonesia

Guru besar hukum perdata Universitas Indonesia , Wahyono Darmabrata menjabarkan ada empat cara penyelundupan hukum yang ditempuh pasangan beda agama. Empat cara tersebut adalah :

- 1) Meminta penetapan pengadilan

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ UDHR Pasal 16 ayat 1

¹⁴¹ Draf KHI Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1-3.

- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
- 3) Penundukan sementara pada salah satu agama, dan
- 4) Menikah diluar negeri.¹⁴²

Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.¹⁴³ Alhasil mulai dari publik figur sampai para penganggur, dari kalangan selebritis sampai para pengemis berbondong-bondong melakukan pernikahan beda agama. Bahkan tidak tanggung-tanggung Ahmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) disamping telah melangsungkan perkawinan beda agama, ia juga telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia.¹⁴⁴

Sejalan dengan perkembangan hukum perkawinan melihat kejadian di masyarakat tentang fenomena sosial yang menjadi peristiwa hukum terkait dengan maraknya pemberitaan, baik melalui media televis, radio, online maupun media cetak tentang pasangan Asmirandah (24 Tahun) dan Jonas Rivanno (26 Tahun) yang merasa terusik dengan kabar mereka melangsungkan pernikahan pada 17 Oktober 2013. Sesuai pernyataan mereka berdua dalam jumpa pers di kediamannya, selasa 29 Oktober 2013 untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Ada hal yang disembunyikan sehingga mengusik awak media dan masyarakat untuk mencari tahu kebenaran kabar yang berkembang. Akan tetapi mereka berdua sepakat menyampaikan bantahan langsung soal berita antara Asmirandah dan Vanno (nama panggilan) katanya:

¹⁴² Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Op.Cit.*, h.65

¹⁴³ Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440, h.290

¹⁴⁴ http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish

“jangan menikah, mendaftar di KUA pun belum dilakukan...rencana akan menikah pada Januari 2014”¹⁴⁵

Selintas fakta-fakta pernikahan antara Asmirandah dan Jonas Rivanno antara lain¹⁴⁶:

- 1) Ada perbedaan antara pernyataan Asmirandah dan Jonas, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 tidak terjadi apa-apa. Namun fakta-fakta pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Sobari seorang petugas PPN yang bekerja mulai tahun 1980 menyatakan; “memastikan pernikahan tersebut memang benar, yakni pada hari Kamis, 17 Oktober 2013, jam 09.00 wib. Mengenai kabar Jonas telah masuk Islam, Sobari tidak tahu persis, namun ia mendapatkan informasi yang berkembang telah diIslamkan oleh Ustad Mahari Madarif dari Masjid An Nur pada Agustus tahun lalu.
- 2) Fakta lainnya, bahwa mereka berdua, menurut Hj. Suhermi, bahwa Andah telah melakukan pendaftaran pernikahan sejak tanggal 10 Oktober tahun 2013. Kemudian memastikan bahwa tanggal 17 Oktober 2013 mereka telah menikah sesuai dengan surat keterangan yang tercatat register kearsipan di Kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat.

Fakta lain terkait dengan pelaksanaan pernikahan antara Andah dan Vanno menjadi tidak jelas, ketika ditelusuri melalui pendapat Saiful Miftah seorang pegawai KUA Beji Depok membantah bahwa tidak ada pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2013, bahkan yang ia tahu rencana pernikahan pada tanggal 10 – 11 Januari 2014. Perbedaan pendapat ini lebih mengarah kebenarannya pendapat Hj. Suhermi, mengingat

¹⁴⁵ Asmirandah, Jonas Rivano, *Berharap bersatu dan bahagia*, Nova 1341. 4-10 November 2013. h.4

¹⁴⁶ Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No.2, Desember 2014, *Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat* oleh M. Wagianto, Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.h.2

datanya jelas, sedang pendapat kedua hanya seorang pegawai KUA dan bukan seorang pengambil kebijakan atau Kepala KUA atau Humas dari KUA tsb. Hal ini bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan penyampaian informasi terkait persoalan pernikahan di lingkungan wilayah hukum KUA Beji Kabupaten Depok.¹⁴⁷

Mencermati kasus antara Asmirandah dengan Jonas Rivanno yang telah memasuki babak pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok. Bahwa Asmirandah melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 November 2013 mengajukan pembatalan pernikahan dengan nomor registrasi perkara No.: 2390/pdt/g/2013/-PA.dpk. Hal ini setelah diterima oleh Entoh Abdul Fatah, Panitera Pengadilan Agama Depok. Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Suryadi selaku juru bicara PA Depok bahwa membenarkan adanya gugatan pembatalan pernikahan dengan alasan Andah merasa tertipu. Terkait pengaduannya, maka telah digelar Rabu, 27 November 2013 di PA Depok, tetapi tidak dihadiri oleh andah yang hanya menunjuk pengaacaranya Afdal Zikri dan Jonas diwakili Muhammad Nuzul Wibawa.¹⁴⁸

Pada perkembangan selanjutnya dalam kurun waktu setahun, pada tahun 2014 terjadi perubahan status perkawinan mereka. Bahwa Asmirandah malah yang pindah agama, oleh karena itu fenomena ini menjadi peristiwa hukum yang mengusik rasa keadilan, kepastian hukum. Juga ketidakberdayaan Pengadilan Agama Depok menuntaskan persoalan ini. Bahkan peristiwa ini menjadi pembiaran tanpa adanya sanksi baik

¹⁴⁷ *Ibid*,

¹⁴⁸ Asmirandah, *Merasa dibohongi, batalkan pernikahan*, Nyata, 1 Desember 2013. h.2

adanya putusan pengadilan ataupun sanksi moral terhadap pasangan Jonas dan Asmirandah.¹⁴⁹

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986. Putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Andy Vonny Gani P. (perempuan/Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen)¹⁵⁰ Yang pencatatan pernikahannya ditolak oleh pihak KUA dan Kantor Catatan Sipil.

Putusan MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka Andy Vonny telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.¹⁵¹

¹⁴⁹ Wagianto, *Op.Cit.*,h.19

¹⁵⁰ Abdul Syukur dan Tim hukumonline.com., *Op.Cit.*,h.63

¹⁵¹ *Ibid.*,

3. Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan Beda Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵²

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa¹⁵³:

- 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”).¹⁵⁴ Berikut beberapa pasal UU Adminduk mengenai pencatatan perkawinan :

Pasal 34 UU Adminduk¹⁵⁵ :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

¹⁵² Jaim Mubarak, *Op.Cit.*,h.67

¹⁵³ <http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

¹⁵⁴

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528d75a6252d7/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama>

¹⁵⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h.23

Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk¹⁵⁶ :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a¹⁵⁷:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda

¹⁵⁶ *Ibid.*, h.24

¹⁵⁷ *Ibid.*, h.77

agama.¹⁵⁸ Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada [Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (“PP 9/1975”).

Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk](#) (yaitu KUA). Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, (Tangerang: Literati, 2014), h.66

¹⁵⁹ *Ibid.*, h.70

BAB III
PUTUSAN PERKARA MK NO.68/PUU-XII/2014
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

G. Pihak-Pihak yang Mengajukan Permohonan *Judicial Review*

Berdasarkan Putusan Perkara MK No.68/PUU-XII/2014 yang telah diolah peneliti, maka permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh :

1. Nama : Damian Agata Yuvens
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Ratu Dibalau Nomor 24, RT 012,
Kelurahan Tanjung Senang,
Kecamatan Tanjung Senang, Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Sebagai : Pemohon I
2. Nama : Rangga Sujud Widigda
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Merpati I Blok H-2/23, RT
008/RW 008, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi Jakarta.
Sebagai : Pemohon II
3. Nama : Anbar Jayadi
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Empu Barada Nomor 1, RT 001,
RW 003, Harjamukti, Cimanggis,
Kota Depok, Jawa Barat.
Sebagai : Saksi III
4. Nama : Luthfi Sahputra
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Behdi IX. Kav. 125, Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Jakarta
Selatan, DKI Jakarta.

Sebagai : Saksi III

Para Pemohon memilih domisilinya hukumnya di Jalan Kencana Permai 2 Nomor 4, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

H. Latar Belakang Pengajuan Permohonan *Judicial Review*

Latar belakang pengajuan ini didasari atas :

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyatakan:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkatan pertama
Pada tingkatan ini, yang dibicarakan adalah keabsahan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional yang didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
 - b. Tingkatan kedua
Dalam tingkatan ini, penilaian terhadap keabsahan perkawinan dilakukan oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan. Kendatipun dapat dipisahkan berdasarkan tingkatan, namun pada esensinya kedua tingkatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hukum agama dan kepercayaan telah “ganti baju” dan mendapatkan sumber formalnya dari negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011: 165).
3. Bahwa pengaturan di atas berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar penafsiran negara atas masing-masing agama dengan kepercayaannya. Atau dengan kata lain, negara “memaksa” agar setiap warga negaranya untuk tunduk kepada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing-masing agama/kepercayaan.
4. Bahwa pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang hendak melangsungkan

perkawinan di Indonesia, karena penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada interpretasi baik secara individual maupun secara institusional. Contoh paling sederhana dapat dilihat dari perkawinan beda agama dan kepercayaan. Tiap agama dan kepercayaan memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan. Bahkan, dalam satu agama/kepercayaan saja bias terdapat pandangan yang berbeda mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dan kepercayaannya. Akibatnya adalah tidak jelas status keabsahan perkawinan beda agama dan kepercayaan yang dijalani, apakah perkawinan nya sah atau tidak sah.

5. Bahwa permasalahan diatas menjadi semakin rumit ketika memasukan kewajiban administratif dalam perkawinan, yaitu pencatatan (vide penjelasan umum UU Nomor 1/1974), kedalam formula. Dalam hal perkawinan dicatatkan, maka penilaian terhadap keabsahan perkawinan terjadi 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Oleh institusi agama dan kepercayaan, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi penafsiran masing-masing individu ;
 - b. Oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dengan didasarkan pada perspektif masing-masing pihak mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya ; dan
 - c. Oleh pegawai pencatat perkawinan ketika melakukan penelitian mengenai syarat perkawinan
6. Bahwa hal diatas menyebabkan kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi mengenai keabsahan perkawinan antara institusi keagamaan dan kepercayaan dengan para pihak dan pegawai pencatat perkawinan. Sekali lagi hal ini dapat terjadi semata-mata karena setiap pribadi memiliki kebebasan penafsiran agamanya dan kepercayaan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009:6).
7. Bahwa akibatnya adalah pelanggaran terhadap hak atas perkawinan yang sah yang diakui UUD 1945.

8. Bahwa lebih lanjut lagi, permasalahan mengenai keabsahan sebuah perkawinan akan berdampak pada akibat hukum dari perkawinan. Hak dan kewajiban hukum dari suami-istri, maupun orang tua- anak baru timbul ketika perkawinan yang dilakukan adalah sah. Dengan tidak jelasnya keabsahan perkawinan, maka akibat hukum yang ditimbulkanpun menjadi tidak jelas.
9. Bahwa masyarakat Indonesia-khususnya yang sudah dan sedang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti hukum agama dan kepercayaan-telah beradaptasi secara negatif untuk dapat menghindari keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974, yaitu dengan cara melakukan penyelundupan hukum.
10. Bahwa secara umum, terdapat 2 (dua) cara penyelundupan hukum yang digunakan, yaitu :
 - a. Menyampingkan hukum nasional ; dan
 - b. Menyampingkan hukum agama

Pada opsi pertama, ada 2 (dua) modus yang digunakan, yaitu :

- a. Menundukan diri pada hukum perkawinan dari agama dan kepercayaan salah satu pihak ; dan
 - b. Berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan.
11. Bahwa penyelundupan hukum, disatu sisi, merupakan perilaku yang “menyimpang”, namun disisi lain mungkin maraknya penyelundupan hukum menunjukkan hilangnya kewibawaan hukum, dan bahkan menggambarkan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
 12. Bahwa keseluruhan uraian diatas jelas menggambarkan betapa keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 justru membawa banyak masalah dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, dan oleh karena itu, sudah saatnya ketentuan ini diubah menjadi **“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agama dan**

kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.”

13. Bahwa upaya untuk mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak boleh dimaknai sebagai bentuk serangan terhadap agama atau kepercayaan tertentu, namun harus dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan dan melindungi pihak-pihak yang sudah, sedang, atau akan melangsungkan perkawinan yang kebolehan nya masih dapat diperdebatkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, misalnya seperti perkawinan beda agama dan kepercayaan- hal mana merupakan suatu kenyataan sosial yang tak dapat disangkal lagi.
14. Bahwa perubahan yang frasa dari pasal 2 ayat (1) UU Noor 1/1974 tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia karena keabsahan dari perkawinan masih harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing mempelai. Hanya saja, hak untuk melakukan penafsiran mengenai keabsahan dari perkawinan diberikan kepada setiap warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan.
15. Bahwa warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dalam melakukannya tanpa perlu melakukan penyelundupan hukum dan tanpa ada kekhawatiran perkawinannya tidak dicatatkan. Disisi lain, warga negara yang tidak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaanpun tetap terakomodasi degan baik kepentingannya. Dengan kata lain, hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia menjadi terjamin dan terpenuhi dengan adanya keadaan baru ini.
16. Bahwa sudah saatnya negara diposisikan pada tempat yang seharusnya dalam konteks perkawinan. Jangan biarkan negara melalui aparturnya menjadi “hakim” mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Membiarkan negara melakukan hal ini, berarti membiarkan negara melakukan pelanggaran

terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional dari seluruh warga negara Indonesia.

Jangan biarkan negara Pancasila ini kehilangan arahnya!

I. Alasan Hukum Pengajuan Permohonan *Judicial Review*

Bahwa permohonan *a quo* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu alasan dalam uji materiil dan alasan uji formil.

1. Alasan uji materiil didalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut :
 - a. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 1/1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945;
 - c. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - d. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; dan
 - e. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak sesuai dengan konsep

pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bunyi pasal dalam UUD 1945 yang diuji dengan Pasal 2 ayat (1) tersebut yaitu : Pasal 27 ayat (1) yaitu : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28B ayat (1) yaitu : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28D ayat (1) yaitu : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”,

Pasal 28 E ayat (1) yaitu : “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”, Pasal 28 E ayat (2) yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 28I ayat (1) yaitu : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 28I ayat (2) yaitu : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28J ayat (2) yaitu : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal 29 ayat (2) yaitu :“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

2. Sedangkan secara formil alasan-alasan pengujiannya adalah sebagai berikut :
 - a. Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyebabkan terjadinya pelbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan;
 - b. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan;
 - c. Keberadaan pasal 2 ayat (1) Nomor 1/1974 justru bertentangan dengan tujuannya sendiri yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

J. Isi Tuntutan Permohonan *Judicial Review*

Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan uji materiil dan formil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan*

kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”;

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”;*
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

K. Putusan Perkara MK No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama

Amar Putusan Perkara MK No.68/PUU-XII/2014 yaitu :

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan perkara diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadili Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan juni, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB oleh delapan hakim konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap anggota, Anwar usman, Maria

Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Manahan MP. Sitompul masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan yang berbeda (*concurring opinion*).

F. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Bidang Perkawinan

Judicial Review yang masuk hingga tahap Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Bidang Perkawinan

No.	Putusan Mahkamah Konstitusi	Tentang	Amar Putusan
1	No.12/PUU-V/2007	Poligami	Menyatakan permohonan Pemohon ditolak
2	No.46/PUU-VIII/2010	Status Anak Luar Kawin	Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian
3	No.30-74/PUU-XII/2014	Batas Usia Perkawinan	Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
4	No.68/PUU-XII/2014	Perkawinan Beda Agama	Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
5	No.69/PUU-XIII/2015	Perjanjian Perkawinan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian

Sumber data telah diolah oleh peneliti, hingga data yang masuk Tahun 2017. Ada beberapa kali pengulangan dalam pengajuan Judicial Review tapi dengan perubahan, seperti agar

tidak lagi memerlukan izin isteri pertama untuk kebolehan izin poligami.¹⁶⁰



¹⁶⁰ Data bersumber dari buku-buku, majalah Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum, dan lain-lain data bersumber pula dari situs www.Mahkamahkonstitusi.go.id, www.hukumonline.com, www.jimlyschool.com dan lain-lain.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 tentang pernikahan beda agama yang telah diolah oleh peneliti, para Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu : a.

Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. Badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa para Pemohon secara *legal standing* (kedudukan hukum) adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya telah dikemukakan di bab III.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah yaitu:

1. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
2. Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
3. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007. Dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pendadapat Mahkamah atas Pokok Permohonan para Pemohon yaitu : Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, keterangan presiden, keterangan pihak terkait, keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan

Umat Budha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;
2. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstiusional warga negara yang

harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara;

3. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974. Menurut para Pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 para Pemohon merasa ada pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah, Undang Undang No 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat;
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974

“memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 karena pasal a quo memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara;
6. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pada pertimbangan hakim dalam pokok permohonan diatas, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menurut peneliti, dalam memahami uraian Para Pemohon dalam *Judicial Review* dengan menggunakan kajian ilmu perundang-undangan, seharusnya memahami Pasal 2 ayat (1) yang berlaku saat ini, dipahami secara matang dalam penafsiran historis/sejarah yaitu bagaimana tarik ulurnya kegaduhan politik NKRI dalam RUU Perkawinan saat itu terlebih Pasal 10 ayat (2) nya.

Pertimbangan hakim dalam putusan MK No.68/PUU-XII/2014 yaitu menolak permohonan para pemohon karena tidak beralasan menurut hukum, menurut peneliti memiliki beberapa landasan yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. Landasan Yuridis yaitu landasan hukum berupa :
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD N RI 1945, Peneliti setuju dengan pendapat Topo Santoso yaitu pasal ini adalah bentuk kompromi yang unik karena bisa diterima semua agama, karena tidak memaksakan satu aturan agama kepada agama lainnya.
 - b. Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Penegasan ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 40 huruf (c), Pasal 44 dan Pasal 61. Diperkuat Fatwa MUI tahun 1980 dan tanggal 28 Juli 2005, juga fatwa atau keputusan organisasi keagamaan seperti NU, Muhamaddiyah, dan Persis.
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 telah berbuah pada UU Adminduk Pasal 35 huruf a yaitu apabila ingin melangsungkan perkawinan beda agama, salah satu pasangan harus meminta penetapan pengadilan dengan menundukan ke salah satu hukum agama dan dicatatkan di KCS ataupun

salah satu calon menjadi muallaf dan dapat melangsungkan perkawinan di KUA.

- d. Kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*) sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dipahami bukan hanya mereka yang melakukan praktek pernikahan beda agama yang hak asasi nya terlanggar, namun setiap warga negara yang meyakini agama dan kepercayaannya yang akan terlanggar hak asasinya bila permohonan ini dikabulkan.
- e. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum Islam, bukan pada penafsiran calon mempelai.
- f. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang didalam Pola Umum Pelita Kedua, khususnya bidang hukum, angka 2 huruf a yang menyatakan : “Peningkatan dan Penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi Hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat” dalam hal ini, peneliti menggarisbawahi kata *memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat*, walaupun saat ini rakyat Indonesia sudah banyak yang sadar hukum bahkan dipengaruhi paham hukum dari barat yang menitikberatkan pada hak asasi *Utilitarianisme* daripada agamanya. Dikabulkannya permohonan *Judicial Review* ini, dapat mencampuradukan paham dan hukum agama yang diakui. Jangan dilupakan nilai-nilai agama dan kebhinekaan yang tertanam di rakyat Indonesia, yang dapat terlihat

dalam Pancasila dan UUD N RI 1945 itu adalah melindungi agama bukan mencampuradukannya.

2. Landasan Filosofis adalah falsafah bangsa, yaitu berupa ideologi Pancasila. Indonesia adalah bukan Negara agama, bukan Negara Atheis tapi Negara Pancasila, yang dimana Negara Pancasila itu melindungi agama sesuai sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Pancasila itu bukan Negara Sekularis yang melepaskan agama dari pemerintahannya namun Negara Pancasila adalah Negara yang melindungi agama dan kepercayaan yang diakui nya. Dikabulkannya *Judicial Review* ini berpotensi mencampuradukan agama dan jauh dari pemahaman melindungi agama.
3. Landasan Sosiologis adalah yang berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Peneliti melihat maraknya penyelundupan hukum pasangan beda agama memang harus diselesaikan lewat peraturan yang jelas, namun *Judicial Review* ini malah akan menambah keruh permasalahan karena berpotensi semakin beragamnya cara penafsiran nya. Masyarakat yang memiliki kultur nusantara yang multi etnis, agama, ras dan lain-lain saat ini sangat rentan mendapat pergeseran pemahaman dunia barat, seperti terlihat dalam *Judicial Review* pernikahan beda agama ini. Dampaknya Agama akan kehilangan identitasnya, peneliti merasa yang dibutuhkan masyarakat adalah peran agama lewat lembaga ataupun organisasi keagamaan itu diperkuat oleh Negara sehingga akan meminimalisir praktek pernikahan beda agama.

Putusan Hakim selain dilandasi pertimbangan di atas, juga mempunyai kekuatan mengikat, memaksa dan juga mempunyai wibawa. Dan wibawa ini ditentukan oleh pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban sehingga putusan tersebut menjadi objektif. Peneliti dalam

memahami pertimbangan hakim dengan menggunakan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa pertimbangannya itu harus mencakup cita hukum (*idee des recht*) yaitu unsur keadilan (*garechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Pertimbangan hakim atas Pasal 2 ayat (1) yang diajukan *Judicial Review* oleh Para Pemohon, menurut peneliti Pasal *a quo* itu dirasa sudah mencakup aspek kepastian hukum yang terletak pada bunyi pasal perundang-undangnya. Pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) sudah mencakup unsur keadilan yang terletak pada nilai-nilai kehidupan, karena Pasal *a quo* sesuai dengan Pancasila.

Pernyataan Bismar Siregar selaku mantan hakim agung, bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakan aturan formal, tetapi ia harus menemukan keadilan yang hidup dimasyarakat. Bunyi Pasal 2 ayat (1) itu sudah sesuai dengan keadilan yang hidup dimasyarakat, karena walau ada penyimpangan berupa pernikahan beda agama. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia, sudah merasa tentram dengan Pasal 2 ayat (1). Pasal ini dirasa sudah sesuai dengan keadaan masyarakat yang multi agama. Pertimbangan hakim juga menghasilkan kemanfaatan, agar tidak adanya penafsiran yang akan menyampingkan hukum agama dan mendahulukan hak asasi semata.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku (*law in the book*), namun Mahkamah Konstitusi selalu memperhatikan dari kemanfaatan (*law in action*) dengan paradigma hukum progresif. Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi dimasyarakat. Hukum progresif

memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi.

Pada hukum progresif, hukum harus melihat dinamika yang mewarnai masyarakat dan bersifat fleksibel terhadap perubahan masyarakat. Pasal-Pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus dikontekstualisasi dalam dinamika masyarakat agar dapat mencapai keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan secara literal dan dogmatis atas dasar kepastian hukum. Secara positivisme, Pasal 2 ayat (1) memberikan posisi pernikahan beda agama adalah sesuatu yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Tetapi jika dikaitkan dengan kajian hukum progresif melalui kajian sosiologis, ekonomis dan budaya maka mereka yang melakukan praktek beda agama merupakan kejadian yang sulit dihindari karena Negara Indonesia yang multiagama, etnis, ras, suku dll.

Penambahan frasa dalam *Judicial Review*, bila dikaitkan dengan keadilan dan kemanfaatan (*law in action*) dalam hukum progresif. Menurut peneliti bukan memberikan apa yang dituju hukum progresif, yang terjadi justru akan melemahkan agama dan tidak mengindahkan Pancasila. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi jelas menolak, dan alasan berbeda (*concurring opinion*) salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Maria Farida Indrati yang tidak memungkiri penyelundupan hukum bisa terus berkembang karena Pasal *a quo*, pendapatnya tetap mengembalikan permasalahan ini pada Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama

Dengan tidak dikabulkannya permohonan *Judicial Review* Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 berarti masih berlakunya ketentuan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam permohonan nya, para pemohon menyatakan bahwa dalam suatu

hukum agama tertentu itu berbeda tafsir dan pendapat mengenai kebolehan pernikahan beda agama terutama agama Islam. Sebagai jumlah mayoritas pengikut agama di Indonesia, agama Islam memegang kendali keharmonian antar umat beragama di Indonesia.

Para pemohon menyatakan penafsiran Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 itu bisa berbeda tergantung dari sudut mana melihatnya, bisa dari calon mempelai, pemuka agama dan petugas pencatat nikah. Mereka menganggap Negara memaksakan (*Hagemoni*) penafsiran mengenai Pasal 2 ayat (1) ini, dengan melarang pernikahan beda agama dalam kajian Undang-Undang Perkawinan. Dan petitum dalam *Judicial Review* pun ingin menambahkan frasa Pasal 2 ayat (1) menjadi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agama dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.

Peneliti dalam skripsi ini dengan melihat permohonan *Judicial Review* ini dari perspektif hukum Islam, setuju dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pernikahan jangan dilihat dari aspek formal saja, namun juga dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, dan sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan negara. Dalam hal ini Negara berperan sebagai fasilitator Agama. maka dalam sidang pun memanggil pihak terkait yaitu Keterangan presiden, Front Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhamaddiyah, Tim Advokat Untuk Kebhinekaan, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Peneliti setuju dengan pendapat Hasyim Muzadi yang menyatakan Indonesia adalah Negara Pancasila dan bukan Negara Atheis maupun Negara Sekuler. Negara Pancasila itu melindungi agama, bukan Negara yang memisahkan Agama seperti Negara Sekuler. Terlebih dalam *Judicial Review* yang berpotensi mencampuradukan antar agama, kita harus berpegang

pada Sila pertama Pancasila. Sesuai pertimbangan hakim yaitu keabsahan perkawinan diserahkan pada agama dan keabsahan administratif diserahkan pada Negara. Agama disini dalam konteks islam dikembalikan pada Lembaga MUI, Organisasi Keagamaan seperti NU, Muhamaddiyah, Persis dll. Yang memberi fatwa haram nikah beda agama.

Peneliti melihat Agama Islam seperti diuraikan dalam landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam pernikahan beda agama yang seorang laki-laki muslim hendak menikahi wanita ahli kitab. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu diperbolehkan, haram dan pendapat yang lebih moderat mengemukakan hukum asalnya halal namun melihat keadaan sosial politik jadi menghendaki ketentuan lain untuk menghindari fitnah. Pada negara Indonesia ini, yang berkemungkinan termasuk agama samawi yang dianggap ahli kitab adalah Kristen Protestan dan Kristen Katholik. Karena dalam menafsirkan kata ahli kitab dalam Al-Qur'an, ulama pun berbeda pendapat. Bahkan ada ulama yang menganggap semua agama itu bisa dikatakan ahli kitab, tidak terbatas pada agama samawi berbeda seperti pendapat mayoritas ulama yang berpendapat sebaliknya.

Peneliti dalam skripsi ini sejalan dengan pemikiran Maimun, yang menjelaskan pemahaman dan jalan pikiran ulama yang terbagi menjadi tiga golongan mengenai kebolehan muslim menikahi wanita ahli kitab. Menurut pendapat pertama, yang menyatakan halal dengan dalil Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Ma'idah ayat 5 itu digunakan Nasakh Mansukh. Surat Al-Baqarah ayat 221 telah dinasakh surat al-Ma'idah ayat 5 yang diturunkan kemudian. Kemudian kata *المشركت* pada surat Al-Baqarah itu tidak termasuk wanita ahli kitab, karena dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 105 dan Al-Bayyinah ayat 1. Lafazh *المشركت* di'athafkan pada *Ahl Al-Kitab*, sedangkan athaf disana keduanya menghendaki adanya perbedaan antara orang musyrik dengan ahli kitab. Kemudian wanita ahli kitab dimaksud berdasarkan *qaul mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i adalah wanita yang beragama Nasrani dan Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang terdahulu (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum

Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah tepatnya sebelum turunnya Al-Qur'an.

Tegasnya orang yang baru menganut agama Nasrani dan Yahudi sesudah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidaklah dianggap ahli kitab karena terdapat perkataan *من قبلكم* (dari masa sebelum kamu) dalam surat Al-Ma'idah ayat 5. Perkataan *من قبلكم* tersebut menjadi pembatas (*Al-qaid*) bagi ahli kitab yang dimaksud. Jalan pikiran madzhab Syafi'i ini kelihatannya mengakui ahli kitab itu bukan karena agamanya, tetapi menghormati karena asal keturunannya. Pada kaitannya dengan Negara Indonesia, maka orang-orang yang beragama Nasrani atau Yahudi sesudah turunnya Al-Qur'an, maka mereka tidaklah termasuk didalam hukum ahli kitab. Demikian juga makanan yang dipotong atau disembelih oleh mereka.

Pendapat kedua yang berpendapat haram, mengkritik pendapat pertama dengan berargumentasikan bahwa memang benar secara nash dan berdasarkan fakta sejarah menikahi wanita ahli kitab diharamkan, tetapi ahli kitab itu termasuk orang kafir musyrik dan Nabi sendiri telah melarangnya. Nabi pernah mengutus Mardad AL-Gaznawi untuk mengeluarkan kaum muslimin yang lemah dari kota Mekkah. Ketika ia tiba di kota Mekkah, ia bertemu dengan seorang wanita yang musyrik yang cantik dan kaya lalu wanita itu pun menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Marsad. Namun, ia tidak mau karena merasa takut kepada Allah, tapi wanita itu mengajak Marsyad bermusyawarah dengannya agar mau menikahnya.

Marsad seraya menjawab : saya mau mengawinimu apabila diizinkan oleh Nabi Muhammad saw, ketika tiba di Madinah hal itu dikemukakan kepada Nabi dan ia memohon untuk merestui keinginannya menikah dengan wanita musyrik itu. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 221 yang bisa dikatakan kisah ini adalah Asbabun Nuzul nya, dari peristiwa ini jelaslah bahwa menikahi wanita ahli kitab yang musyrik adalah haram hukumnya.

Kritikan pendapat kedua itu dibantah oleh pendapat pertama, yang bila menikahi wanita ahli kitab itu diharamkan justru kontradiksi dengan nash Al-Qur'an yang secara tegas membolehkannya, sebagaimana Rasyid Ridha menegaskan

bahwa wanita ahli kitab tidak saja halal tetapi halal pula sesembelihan mereka. Oleh karena itu pada umumnya ulama salaf membolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab, maka tidak heran ada pemahaman dalam masyarakat Indonesia saat ini pun menganggap seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab itu diperbolehkan.

Pendapat ketiga yang pada dasarnya membolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab, hanya secara politis (*siyasaḥ syar'iyah*) mereka tidak membolehkan. Sebab dikhawatirkan, suami yang telah menikahinya itu terbawa ke agama isteri, bukan sebaliknya. Artinya, sekiranya wanita kitabiyah yang telah dinikahi itu mampu di Islamkan oleh suaminya, maka kondisi seperti inilah sebenarnya yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam. Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, yang telah dikemukakan dalam landasan teori memperlihatkan keadaan yang tidak baik bagi agama Islam. Dengan berpindahnya agama Asmirandah ke agama suaminya Jonas Rivano yang seorang Nasrani. Hasil dari pernikahan pernikahan beda agama juga bisa berdampak tidak baik bagi agama Islam, bila kita lihat Nana Mirdad, Nasyila Mirdad dan adik-adiknya pula mengikuti agama ibunya Lidya Kandau yang Nasrani, bukan mengikuti agama bapaknya Jamal Mirdad yang beragama Islam.

Sesuai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Agama menentukan keabsahan perkawinan, Agama Islam memiliki mekanisme dalam menerapkan hukum. Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad berupa istihsan, masalah mursalah, istishab, al-'Urf, Syar'i Man Qoblana dan Saddu al-Zari'ah.

Peneliti menggunakan tiga teori dalam menganalisis pertimbangan hakim MK tentang pernikahan beda agama melalui hukum islam, yaitu :

1. Grand Teori atau Teori Primer berupa *Maslahah Mursalah*, di dalam hukum Islam mengenal konsep masalah yang oleh ulama ushul fiqh dikategorikan

menjadi tiga macam, yakni *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah* dan *al maslahah al-mursalah*. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan peluang pernikahan beda agama melalui perubahan frasa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 termasuk dalam kategori *maslahah al-mursalah* hal ini karena dari segi tujuan *syara'*, bertujuan dalam lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ditinjau dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maslahah* dikategorikan menjadi tiga macam yakni : *al maslahah al dharuriyyat*, *al maslahah al hajjiyat* dan *al maslahah al tahsiniyat*. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68-PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama termasuk dalam kategori *al maslahah daruriyyat*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Adapun alasan peneliti mengkategorikan *muslahah dharuriyyat* ini sebagai pendukung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pernikahan Beda Agama, yaitu :

- a. *Dharuriyyat* adalah segala sesuatu yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia.
- b. Pernikahan beda agama bila dilaksanakan akan merusak agama Islam, karena bisa terjadi permurtadan si suami.
- c. Pernikahan beda agama akan berdampak pada rusaknya keturunan, yaitu si anak yang berbeda agama dengan bapaknya akan tidak bisa dinasabkan dengan bapaknya. Dan berdampak pada hak dan kewajiban antara anak dan si bapak.
- d. Petition penambahan frasa, juga berpotensi membuat negara ini menjadi tidak ada kepastian hukum dalam bidang perkawinan. Peran agama menjadi lemah, karena rakyat muslimnya tidak mengindahkan fatwa MUI, Ormas Islam bahkan Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukan bagi mereka.

Dilihat dari hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pernikahan beda agama dari kacamata *dharuriyyat* ini sangat sudah disadari oleh pembuat hukum. Dengan pasal 8 huruf f Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “ Pernikahan dilarang antara dua orang yang : mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Fatwa MUI, NU, Muhamaddiyah, Persis yang dikemukakan di landasan teori mengatakan haram pernikahan beda agama. Pada Pasal 1 Undang Undang Perkawinan berbunyi “ Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemahaman ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan mencampuradukan agama yang satu dengan yang lain. Bisa dilihat Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang mengakui keberadaan Agama, bukan negara sekularis ataupun komunis yang pernah mencoba memasukan pahamnya pada RUU Perkawinan Tahun 1973 yang melegalkan pernikahan beda agama. Sehingga terjadi perdebatan panjang, dan resminya Pasal 2 ayat (1) yang berlaku ini demi keutuhan NKRI. Dalam kaitan ini, *dharuriyyat* nya lebih terlihat lagi untuk menjaga agama serta kebhinekaan.

Pada kompilasi hukum Islam ketika proses pembentukannya yang berdasar dari 13 Kitab fiqh, hasil wawancara terhadap ulama-ulama dari 10 lokasi di Indonesia, jalur yurisprudensi dan jalur studi perbandingan menyatakan larangan nikah pada Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, sudah secara jelas melarang pernikahan beda agama. Pasal 3 yang menyatakan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu pun tidak akan terwujud dengan pernikahan beda agama ini, Pasal 4 sangat lebih mengkokohkan posisi Islam karena berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Teori Sekunder yaitu Ditinjau dari metode *sa'du dzariyah*, yang berarti menutup jalan yang menimbulkan kemafsadatan. Sekalipun apabila kita berpegang pada pendapat yang berdasar nash yang menyatakan halal nya wanita ahli kitab, bisa dimaknai Fatwa MUI, Ormas dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII adalah langkah preventif atau pencegahan dengan cara melarang pernikahan beda agama di Indonesia.
3. Teori Tersier yaitu berupa aplikasi dari paradigma atau teori tentang relasi Agama dan Negara, yaitu :
 - a. Teori Integralistik (*Unified Paradigm*), yaitu paradigma yang memunculkan paham negara agama atau teokrasi. Menurut paradigma integralistik, antara Negara dan Agama menyatu (*integrated*). Dalam paham teokrasi, hubungan Negara dan Agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan Agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan Negara dilakukan atas titah Tuhan.
 - b. Teori Simbiotik, yang dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi Negara dan Agama saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama. Karena dengan agama, Negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.

Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

Dalam konteks paradigma atau teori simbiotik ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban Agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan Negara, maka Agama tidak bisa berdiri tegak.

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut meligitimasi bahwa antara Negara dan Agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam teori ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum Agama.

c. Teori Sekularistik (*Sekularistic Paradigm*)

Paradigma ini memisahkan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Negara dan Agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasarkan pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Paradigma ini memunculkan Negara sekuler. Dalam negara sekuler, system dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma Agama.

Ketiga teori diatas yaitu, teori integralistik, simbiotik dan sekularis. Melahirkan sebuah teori baru yang dipandang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Relasi Agama dan Negara di Indonesia selalu mengalami pasang surut karena relasi antar keduanya tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi dan budaya. Pendiri Negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif

tentang bentuk Negara dalam hubungannya dengan agama. Pancasila sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa”, dinilai sebagai paradigma relasi Agama dan Negara yang ada di Indonesia.

Lukman Hakim Saipuddin berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun hal itu bukan berarti bahwa Indonesia merupakan Negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan Agama ialah relasi yang bersifat simbiosis-mutualistik dimana yang satu dan yang lain saling memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang dalam” sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan.

Indonesia bukan negara agama melainkan negara hukum. Hukum menjadi panglima, dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Artinya bahwa Undang-Undang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan anggota DPR terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompok Agama. Jadi Agama tidak pernah mengatur negara, begitu juga sebaliknya negara tidak semestinya mengatur kehidupan beragama seseorang. Sesuai historis maupun secara yuridis, Negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Pancasila.

Mahfud M.D. menyebut Pancasila merupakan suatu konsep prismatik. Prismatik adalah suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya. Negara Pancasila adalah sebuah *religion nation state* yakni sebuah Negara kebangsaan yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan

semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa pembedaan besarnya dan jumlah pemeluk.

Teori relasi Agama dan Negara yang dipakai di Indonesia yaitu Paradigma Pancasila dikaitkan dengan *Judicial Review* untuk pelegalan pernikahan beda agama, menurut peneliti itu bertentangan. Karena paradigma Pancasila itu melindungi agama, sedangkan dikabulkannya *Judicial Review* itu berpotensi mencampuradukan agama. Jadi menurut peneliti, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 tentang pernikahan beda agama telah sesuai dengan Hukum Islam dan teori relasi Agama dan Negara yang berlaku di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai pernikahan beda agama dan hasil analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan MK No.68/PUU-XII/2014. Maka peneliti berkesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara; Peneliti menganalisis pertimbangan hakim dari landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hakim menurut peneliti sudah mencakup *idee des recht* yaitu unsur keadilan (*garechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku (*law in the book*), namun Mahkamah Konstitusi selalu memperhatikan dari kemanfaatan (*law in action*) dengan paradigma hukum progresif.
2. Analisis hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, bisa dipahami yang menjadi perbedaan pendapat dalam Islam adalah hukum laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab terbagi tiga golongan yaitu diperbolehkan, haram, dan pendapat yang lebih moderat mengemukakan hukum asalnya halal namun melihat keadaan sosial politik jadi menghendaki ketentuan lain untuk menghindari fitnah. Pendapat terkuat, yang termasuk ahli kitab adalah Yahudi dan

Nasrani. Berarti di Indonesia yang termasuk adalah Kristen dan Katholik. Sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia, bisa antar lima agama dan satu kepercayaan. Peneliti dalam menganalisis pertimbangan hakim dengan hukum Islam menggunakan tiga teori, yaitu *masalah mursalah*, *sa'du dzariyat* dan relasi agama dan negara yang melahirkan paradigma Pancasila. Dari ketiga teori tersebut, menyatakan bahwa pernikahan beda agama lebih cenderung kemafsadatan nya dan tidak sesuai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peneliti berpendapat pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Untuk melengkapi penelitian terhadap kajian ini dan berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Semoga eksistensi agama dalam NKRI tidak tergerus dengan perkembangan zaman dan Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku kurang lebih 43 tahun, karena banyak hal-hal yang belum diatur didalamnya ketika melihat kondisi saat ini. Semoga akan di perbaiki kedepannya dalam prolegnas.
2. Semoga ulama ulama Indonesia tetap padu dalam mempertahankan hukum pernikahan beda agama di Indonesia karena kemudhorotannya bisa menghancurkan keberadaan agama di Negara yang menaganut ideologi Pancasila ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo.
- Abror, Khoirul. 2015 *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. 1999. *Kado Perkawinan*, Cet. 2. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husni. 2005. *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, Jakarta : Penamadani.
- Al-Asqalani , Alhafidz Ibnu Hajar. t.t. *Bulughul Marom*, Surabaya : Nurul Huda.
- Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar. 2014, *Terjemah Bulughul Marom*, Semarang : Dahara Prize.
- Ahmad Saebani, Beni. 2013, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum dari Konstitusi sampai Implementasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet.2. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Ash-Shiddiqy, Hasby. 1975. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- , 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2011. *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia*, cet.2. Jakarta : Sinar Grafika
- At-Thabari, Ibn Jarir. 2000, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Muassah Ar-Risalah, III: 711-713,

- Badri, Yusuf. 2004, *Fatwa Ulama Ormas Islam tentang Pernikahan Beda Agama (MUI, Muhammadiyah, Persis dan NU)* , Bandung: PPs UIN SGD.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. 2012, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2012 *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 1997, *Metode Research*, Yogyakarta : Andy Offset.
- Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, Yahya. 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974, Peraturan Pemerintah No.9/1975*, Medan : CV.Zahir Trading
- Haroen, H.Nasroen (Pemimpin Redaksi), 2003, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hassan, A. 1988, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung : CV. Dipoenogoro.
- Junaidi, Dedi. 2003, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Kautur, Ranny. 2000 *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* ,Bandung : Taruna Grafika.
- Kemendikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cet.ke-3,edisi kedua.
- Kementrian Agama, 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan Dan Peran Perempuan*, Cet. 2. Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Kementrian Agama RI., 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV. Diponogoro.
- Maimun, 2015, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*, Bandar Lampung; Anugrah Utama Raharja.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2015. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Edisi 14. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Majelis Ulama Indonesia , 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta; Erlangga.
- Masyhuri , Abdul Aziz. 1977, *Masalah Keagamaan : Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama* (Surabaya; PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press.
- Mubarak, Jaih. 2015, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Mukri, Moh. 2011. *Benarkan Imam Syafi'i Menolak Masalah?*, Cet. 2. Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. "Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama", dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, ed. *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, cet. 1. Jakarta : Kapal Perempuan.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*., Jakarta : Ghalia Indonesia. cet. 7
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ridha, Rasyid. 1367 H, *Tafsir Al-Manar*, Kairo : Dar Al-Manar.
- Rofiq, Ahmad. 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Salim, Peter. dan Yenni Salim, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Shihab, Umar. 2005, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Penamadani.
- Siddik, Badruzzaman. 2014. *Perkembangan Peradilan Di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*, Edisi Revisi ke 2, Cet. 2. Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

- Syukur, Abd dan Tim Hukumonline.com. 2014. Taya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum DI indonesia, Cet. 1. Jakarta : Lentera Hati.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat : Kajian Fikah Nikah Lengkap*, Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Usmah, Abu Hafsh, 2006. *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir.
- Wagianto, Mustafa. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, Semarang : Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*. Ciputat : Adelina.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2005. *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits*, Jakarta : Pustaka Darus-Sunnah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Luar Daerah Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Jurnal Ahkam Vol XIII No.1, Januari 2013. *Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama*, oleh Khamami Zada, Jakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
- Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No.2, Desember 2014, *Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat* oleh M. Wagianto, Bandar Lampung :

Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan
Lampung.

Jurnal Al-Mawarid Vol.XI. No.2, Sept – Jan 2011, *Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM* oleh Faiq Tobroni, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jurnal Asy-Syari'ah Volume 16 Nomor 3, Desember 2014, *Kawin Beda Agama dan Perlindungan HAM (Studi Kritis atas UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan UUD 1945* oleh Yedi Purwanto, Bandung : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.

Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440, *Undang Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum* (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) oleh Muhammad Ashsubli, Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jurnal Ijtima'iyya Vol.1 No 2 , Agustus 2008, *Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*,. Lampung : Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No 1 Maret 2007 Jakarta :
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.

Jurnal Konstitusi, 2015. Volume 12, Nomor 3, September 2015.
Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Majalah Nova, 1341. 4-10 November 2013, *Asmirandah, Jonas Rivano, Berharap bersatu dan bahagia*, t.t : t.t.

Majalah Nyata, 1 Desember 2013. *Asmirandah, Merasa diboongi, batalkan pernikahan*, t.t : t.t.

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish

<http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528d75a6252d7/ma-salah-pencatatan-perkawinan-beda-agama>

<http://ressay.wordpress.com/2011/04/02/relasi-negara-dan-agama>